

HASIL PENELITIAN

**KAJIAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN KUDUS DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN PERBANKAN
(STUDI KASUS PADA SEKTOR BPR KONVENSIONAL)**

TIM PENELITIAN :

Ali Maskur, SE, Mkom (Ketua)

Purwanto Waluyo, SE, Msi (Anggota)

Dra. Marlien, MM (Anggota)

Rina Choiriyati (NIM: 08.05.51.0157) (Anggota)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

2012

**KAJIAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN KUDUS DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN PERBANKAN
(STUDI KASUS PADA SEKTOR BPR KONVENSIONAL)**

Abstract

The aim of his study is to examine the economy potential of Kabupaten Kudus for micro banking investment change bu using the historical data for periode of 2005-2009, and by applying descriptive analysis and trend analysis. Factor that analysis is ; demografy, gross regional domestic product, income per kapita and banking competitions.

The result found the regional economic of Kabupaten Kudus growth for periode 2005 – 2009 and beyond. It also found that the market competitions of banking is low which is able to stimulate a policy is needed to motivate all parties to make invesment in this area.

Finally, it is recommended that to increase micro banking investment of Kabupaten Kudus.

Keyword : *The condition of regional economic, the market competition of banking, bussines feasibility, captive market.*

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji potensi wilayah Kabupaten Kudus bagi investasi pengembagnan perbankan mikro (BPR konvensional) dengan menggunakan data historis dari periode 2005-2009 dan dianalisa secara deskriptif dan memprediksinya dengan analisis trend. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah ; demografi, produk domestik regional bruto, pendapatan perkapita, dan tingkat persaingan perbankan.

Hasil dari kajian menunjukkan bahwa perekonomian regional di Kabupaen Kudus tumbuh baik dan persaingan perbankan belum cukup ketat. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Kabupaten Kudus bagi pengembangan kredit kecil dan mikro yang merupakan *corebusiness* BPR masih sangat menjanjikan.

Melihat berbagai aspek yang dianalisis dapat disimpulkan bahwa peluang investasi bagi pengembangan perbankan mikro (BPR Konvensional) di Kabupaten Kudus masih cukup besar.

Kata Kunci : potensi wilayah, Tingkat persaingan Bank, Kelayakan Bisnis, *captive market*.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Adanya investasi yang baik berarti akan menambah kapasitas input dalam proses

produksi sehingga pada akhirnya akan menambah output dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Diterapkannya kebijakan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001, maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Namun banyak hal yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan desentralisasi tersebut, khususnya dalam menarik para investor baru ke daerahnya. Hambatan-hambatan tersebut nampaknya tidak banyak yang dapat dikenali oleh suatu daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya dilakukan penelusuran-penelusuran atau evaluasi diri tentang pemerintahannya terutama yang terkait dengan rendahnya minat para investor.

Salah satu peluang investasi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah menciptakan peluang investasi di bidang perbankan. Dengan berkembangnya sektor perbankan di suatu daerah, dipastikan akan terjadi “*multiflier effect*” investasi pada bidang-bidang lainnya. Karena perbankan selain sebagai perusahaan yang berdiri atas dasar investasi dari para investor, perbankan juga merupakan perusahaan yang dapat menciptakan investasi dibidang lainnya. Oleh karena itu kebijakan pemerintah daerah yang dapat mendorong minat investor untuk berinvestasi dibidang perbankan menjadi bagian penting bagi penciptaan iklim investasi yang baik disuatu daerah.

Hasil survey terhadap masyarakat tentang perbankan yang dilakukan oleh Karim Business Consulting menemukan bahwa 65 % responden menyatakan bahwa mereka nasabah bank konvensional. Riset juga menemukan bahwa konsumen perbankan Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu :nasabah loyalis syariah, nasabah *floating market* dan nasabah loyalis konvensional. Potensi dana dari nasabah loyalis syariah diperkirakan mencapai Rp. 10 trilyun, nasabah *floating market* diperkirakan Rp. 720 trilyun dan nasabah loyalis konvensional diperkirakan mempunyai potensi dana Rp. 240 trilyun.

Meskipun tidak mudah untuk memperebutkan pangsa pasar perbankan, khususnya untuk pasar mengambang (*floating market*), namun

dengan strategi yang unggul, bisnis perbankan masih sangat potensial untuk beroperasi di pasarperbankan Indonesia, tidak terkecuali untuk perbankan di segmen mikro yaitu BPR.

Kabupaten Kudus adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang cukup besar, jumlah penduduk di tahun 2009 berjumlah sebanyak 7.972.617 jiwa (Kab. Kudus dalam angka, 2010), menjadikan Kabupaten Kudus cukup berpotensi untuk pengembangan bisnis perbankan, apalagi untuk perbankan mikro, karena bisnis perbankan mikro memang banyak dikembangkan dengan prinsip *community base*.

Pengembangan bisnis perbankan di Kabupaten Kudus menjadi lebih prospektif tatkala perbankan yang akan dikembangkan adalah perbankan mikro. Hal ini beralasa karena sampai dengan tahun 2009, dari rata-rata pendapatan perkapita penduduk Kabupaten kudus sebesar Rp. 36.239.770.-perbankan hanya berhasil mengambil sebesar Rp. 5.140.936,68 ataqu setara dengan 15,89 % sebagai dana pihak ketiga (DPK) mereka, berarti peluang perbankan (termasuk BPR) untuk meraih dana masyarakat masih sangat besar. Hal ini adalah potensi dasar bagi pengembangan BPR di Kabupaten Kudus.

2. Perumusan Masalah

- a. Apakah masih ada potensi bagi pengembangan BPR Konvensional di kabupaten Kudus ?
- b. Bagaimanakah potensi pasar BPR Konvensional di kabupaten Kudus dalam waktu 3 tahun yang akan datang ?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengukur apakah ada potensi pasar bagi pengembangan BPR Konvensional di kabupaten Kudus.
- b. Untuk mengukur bagaimanakah potensi pasar BPR Konvensional di kabupaten Kudus dalam kurun waktu 3 tahun yang akan datang.

B. LANDASAN TEORI

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan (Meier, 1989). *New Growth Theory* menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, oleh karena itu pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi (Romer, 1994). Peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

2. Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kesehatan dan pendidikan dapat juga dilihat sebagai komponen vital dalam pertumbuhan dan pembangunan sebagai input bagi fungsi produksi agregat (Todaro, 2002).

3. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dalam model pertumbuhan endogen (Teori Harrod-Domar) dikatakan bahwa hasil investasi akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu negara semakin besar. Implikasi yang menarik dari teori ini adalah mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer (*complementary investment*) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian. Mengingat investasi komplementer akan menghasilkan manfaat personal maupun sosial, maka pemerintah berpeluang untuk memperbaiki efisiensi alokasi sumberdaya domestik dengan cara menyediakan berbagai macam barang public (sarana

infrastruktur) atau aktif mendorong investasi swasta dalam industri padat teknologi dimana sumberdaya manusia diakumulaskannya.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal, Strategi pengembangan wilayah yang bertumpu pada sumber daya lokal dikenal sebagai konsep pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*). Menurut Firman (1999), definisi ekonomi lokal adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan suatu lokasi secara sosial-ekonomi dengan lebih mandiri, berdasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, baik sumber daya alam, geografis, kelembagaan, kewiraswastaan, pendidikan tinggi, asosiasi profesi maupun lainnya.
- b. Ditumbuhkembangkan terutama oleh masyarakat lokal (*local community*) itu sendiri.
- c. Dilakukan pada skala yang kecil
- d. Mengorganisasi serta mentransformasi potensi-potensi ini menjadi penggerak bagi pembangunan local
- e. Diperlukan kehadiran para penggagas.

Konsep pengembangan ekonomi lokal sangat ditentukan oleh tumbuh dan berkembangnya wirausaha lokal dengan memanfaatkan potensi ekonomi ekonomi yang ada (Coffey dan Polese, 1984.) Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, keberadaan industri kecil memiliki peranan yang penting. Industri kecil umumnya berkembang karena adanya semangat kewirausahaan lokal. Disamping itu aktifitas ekonomi industri kecil lebih mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal, terutama input bahan baku, dan tenaga kerjanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan industri kecil dapat berpotensi sebagai penggerak tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di suatu wilayah.

5. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut *Asian Development Bank* (ADB) lembaga keuangan mikro (*Micro finance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Sedangkan bentuk LKM dapat berupa : (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya

organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI Unit Desa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattamwil (BMT)*, lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya. Keberadaan LKM muncul seiring dengan pesatnya aktifitas UKM namun disisi lain dihadapkan pada kendala keterbatasan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

6. Industri Kecil.

Pengertian industri kecil menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 9/1995 tentang usaha kecil disebutkan : “Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

Kriteria industri kecil adalah sebagai berikut:

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-
- Milik warga negara Indonesia
- Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung pada usaha menengah atau usaha besar.
- Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

7. Penelitian Sebelumnya tentang Peran Perbankan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi.

Penelitian King dan Levine (1993), Levine dan Zervos (1996) serta Arestis dan Demetriades (1997) menunjukkan bahwa terdapat hubungan

positif antara perkembangan sektor perbankan dan pertumbuhan ekonomi. Penerima nobel ekonomi John Hicks menyatakan, revolusi industri tak mungkin mengantarkan perekonomian Eropa lebih maju tanpa diikuti pengembangan sektor keuangan. Ekonom Bangladesh Muhammad Yunus menerima nobel perdamaian atas keberhasilannya memberantas kemiskinan dengan menggunakan lembaga keuangan (bank desa), yakni Grameen Bank. McKinnon (1973) dan Levine (1997) menyatakan bahwa meskipun lembaga keuangan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi jumlah bank di suatu wilayah harus melihat aspek *density ratio* atau jumlah bank per jumlah penduduk.

Sukaatmaja (2003) menemukan bahwa di Denpasar dan kabupaten Badung telah terjadi kejenuhan Bank. Sementara Jembrana, bangli, karang asem da Buleleng merupakan wilayah yang masih terbuka untuk mendirikan bank baru. Studi Inspect (2005) juga menemukan bahwa menjamurnya BPR menyebabkan terjadinya kejenuhan di sektor perbankan. Oleh karena itu pendirian suatu kantor cabang bank atau BPR perlu mempertimbangkan potensi ekonomi suatu daerah.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Data.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berbentuk data runtun waktu (time series), yaitu data tahunan mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

2. Metode Pengumpulan Data & Sumber Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi . Sumber data adalah Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik (BPS), serta Dinas/Lembaga terkait.

3. Model Penelitian.

Model penelitian ini berdasarkan pada rerangka penelitian deskriptif

4. Obyek Penelitian.

Obyek penelitian yang akan diteliti adalah potensi pasar Kabupaten Kudus bagi investor pada LKM Perbankan Konvensional.

5. Definisi Variabel

- a. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000)
- b. Investasi adalah pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal (*capital stock*) terdiri dari pabrik, mesin kantor dan produk-produk tahan lama lainnya (Dornbusch dan Fischer, 1994)
- c. Lembaga keuangan mikro menurut *Asian Development Bank* (ADB) lembaga keuangan mikro (*Micro finance*) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan, kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil.
- d. Kredit Mikro : menurut definisi yang dipakai dalam Micro credit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek usaha yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan.yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya.
- e. Industri Kecil : pengertian industri kecil menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 9/1995 tentang usaha kecil disebutkan : “Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”

6. Hipotesis

- a. Ada potensi pasar bagi pengembangan LKM Perbankan Konvensional di kabupaten Kudus.
- b. Potensi pasar LKM Perbankan Konvensional di kabupaten Kudus di tahun-tahun yang akan datang semakin baik.

7. Analisis Data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Trend

D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Geografis

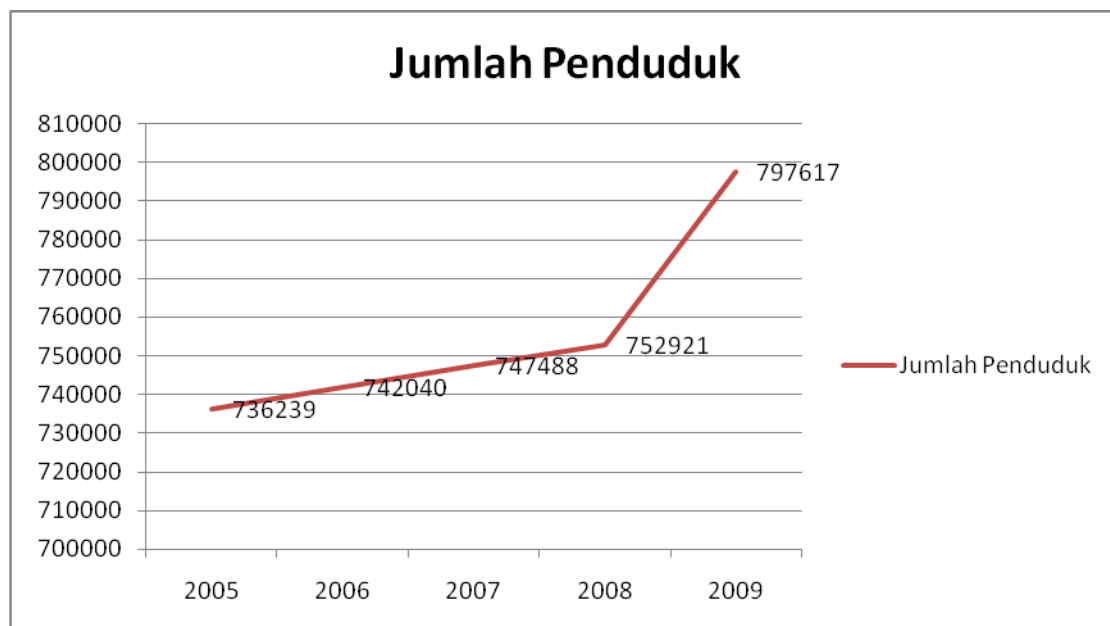
Kabupaten Kudus memiliki Luas wilayah 42.516 hektare, terletak antara 110°36' dan 110°50' bujur timur dan antara 6°51' dan 7°16' lintang selatan. Lahan pertanian berupa sawah menempati areal 20.687 hektare atau 48,66 % dari seluruh areal wilayah Kabupaten Kudus , kondisi ini akan sangat mempengaruhi potensi ekonomi kab. Kudus. Secara administratif geografis Kabupaten Kudus dibagi dalam 9 kecamatan dan 123 Desa dan 9 Kelurahan.

2. Aspek Demografis

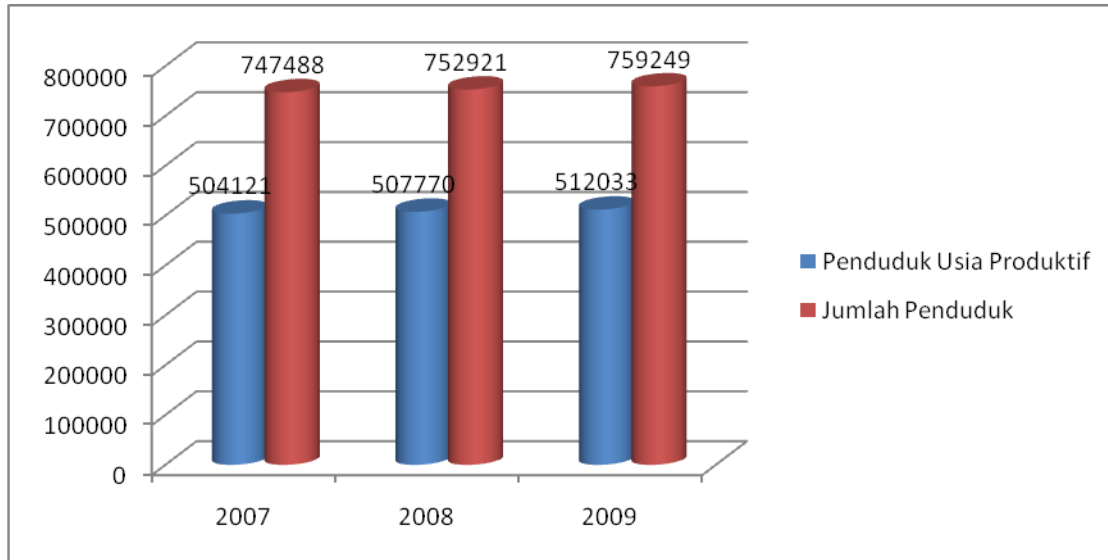
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang besar yang diiringi dengan penyerapan tenaga kerja merupakan potensi ekonomi yang besar. Jumlah penduduk kab. Kudus terus mningkat dengan tingkat pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2008-2009 sebesar 5,94%. (lihat Gambar 1)

Gambar 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2009

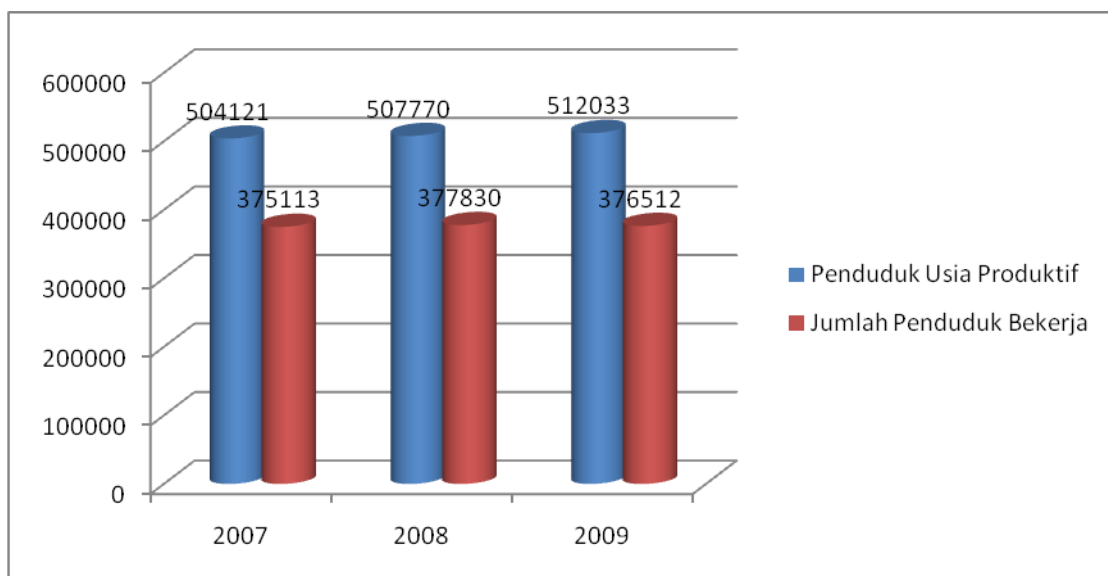


Gambar 2
Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Total Jumlah Penduduk
Kabupaten Kudus tahun 2007-2009



Gambar 2, menjelaskan proporsi jumlah penduduk usia produktif terhadap total jumlah penduduk sebesar 67,44%, hal ini mengindikasikan bahwa sebagai besar penduduk merupakan tenaga kerja produktif yang juga merupakan potensi ekonomi.

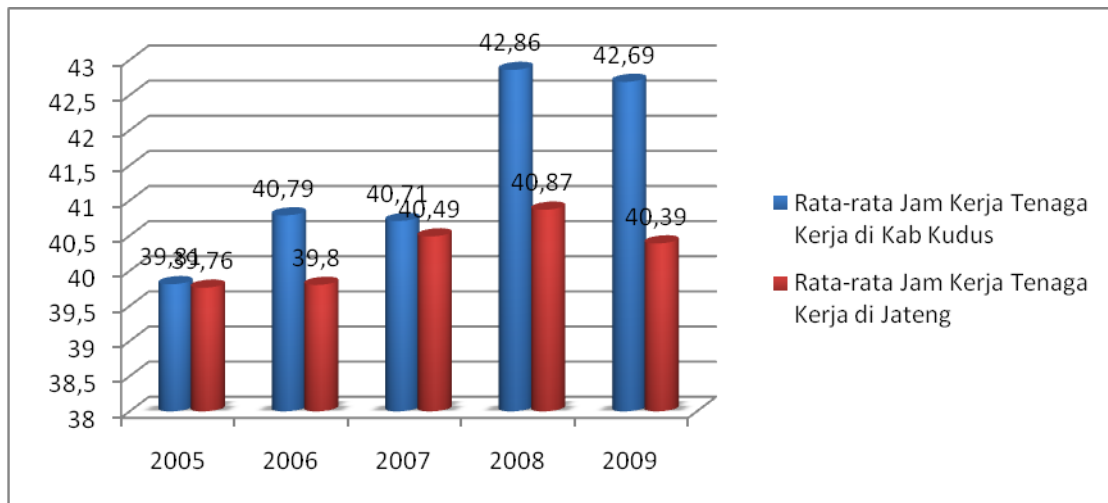
Gambar 3
Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif & Jumlah Penduduk yang Bekerja
di Kab. Kudus



Gambar 3 menjelaskan sebagian besar jumlah penduduk usia produktif merupakan tenaga kerja yang sudah bekerja dan memperoleh penghasilan, kondisi ini merupakan potensi yang baik bagi perkembangan bisnis di kabupaten tersebut.

Gambar 4.

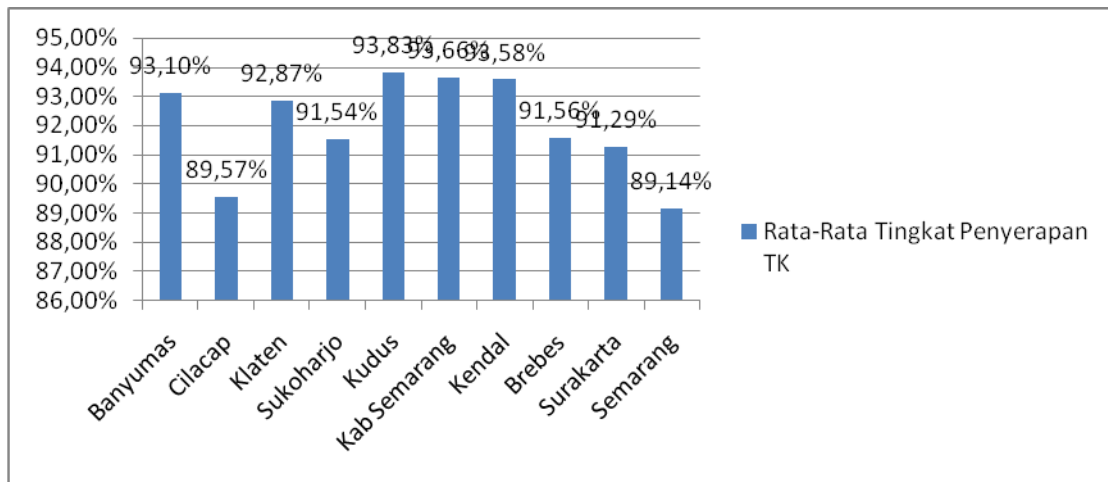
Perbandingan rata-rata jam kerja dalam seminggu di Kab. Kudus dan Jawa Tengah



Gambar 4 menjelaskan bahwa rata-rata jam kerja tenaga kerja di Kab. Kudus sebesar 41,37 jam/minggu lebih tinggi dibandingkan rata-rata di Jawa Tengah yang sebesar 40,26 jam/minggu. Jam kerja tenaga kerja merupakan variabel pembentuk produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi tingkat produktivitasnya akan meningkatkan pendapatan tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi akan menarik iklim investasi di wilayah tersebut, *multiplier effect* berikutnya pendapatan penduduk akan ikut meningkat.

Gambar 5

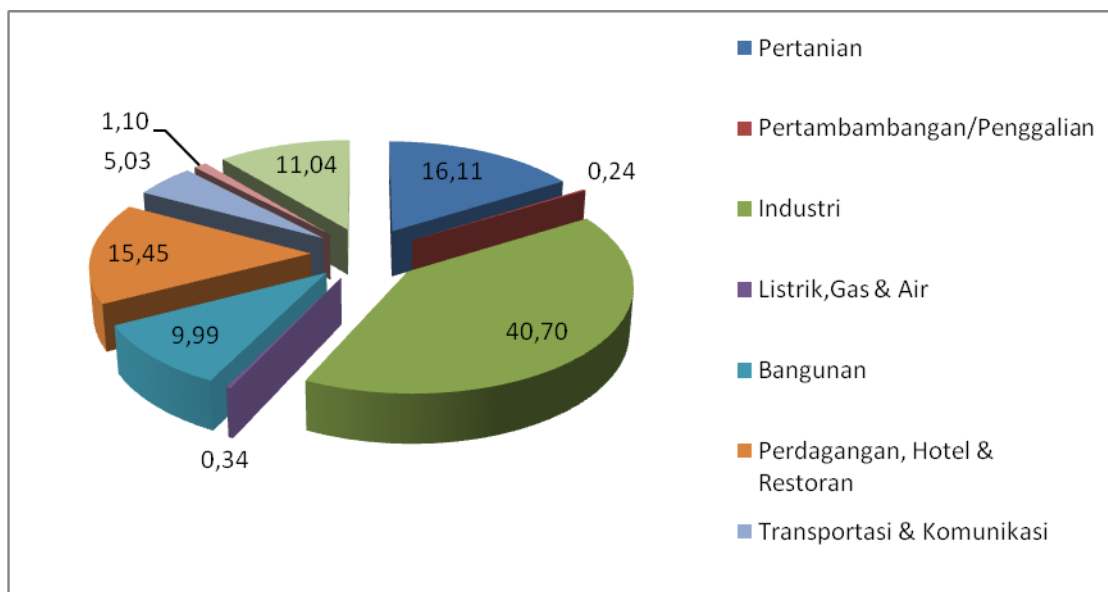
Ranking Rata-rata Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada 10 Kab/Kota dengan PDRB Terbesar di Jawa Tengah



Gambar 5, menjelaskan bahwa kab. Kudus menempati ranking 1 dalam hal tingkat penyerapan tenaga kerja dari 10 Kab/Kota dengan APBD terbesar di Jawa Tengah.

Gambar 6.

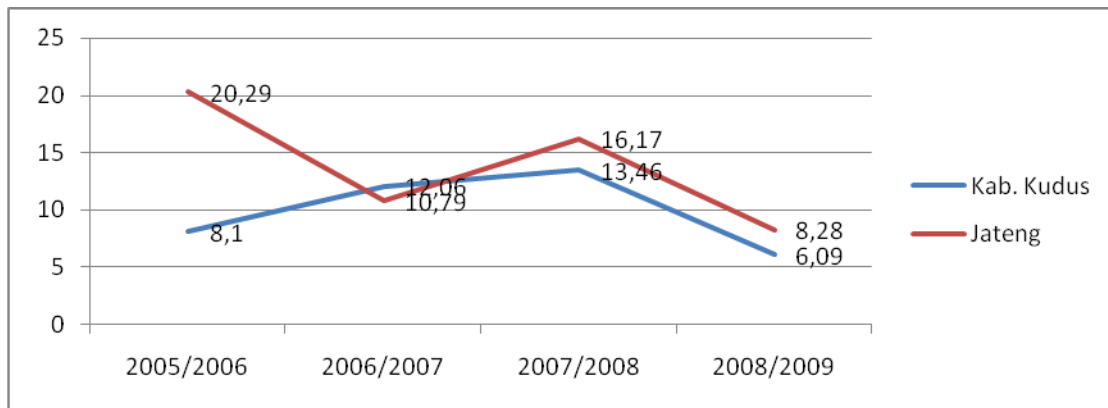
Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tiap sektor Ekonomi



3. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

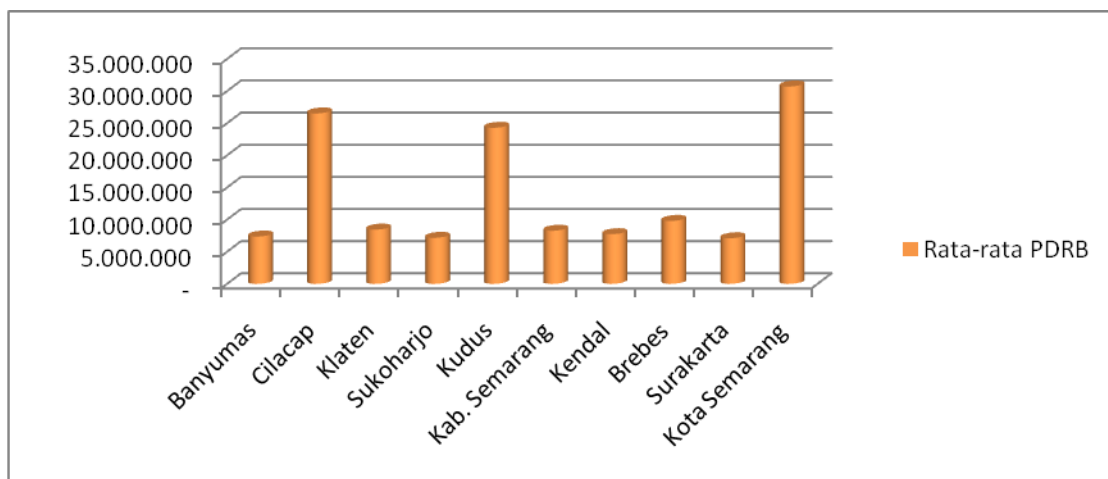
Gambar 7

Perbandingan % Pertumbuhan PDRB Kab.Kudus vs Jawa Tengah



Gambar 8

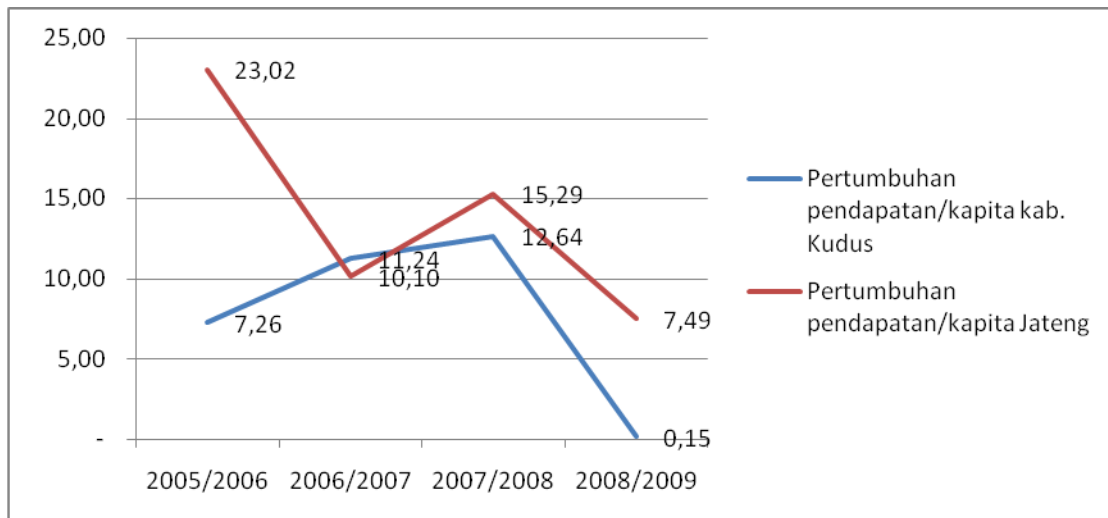
Rangking 10 Kota/Kabupaten dengan Rata-rata PDRB Terbesar
Di Jawa Tengah tahun 2005-2009 (dalam Jutaan Rupiah)



Gambar 8, menjelaskan Kab. Kudus menempati ranking 3 diantara 10 kabupaten/kota dengan PDRB tetrbesar di Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan perekonomian Kabupaten Kudus yang baik sehingga akan menarik minat investasi.

Gambar 8

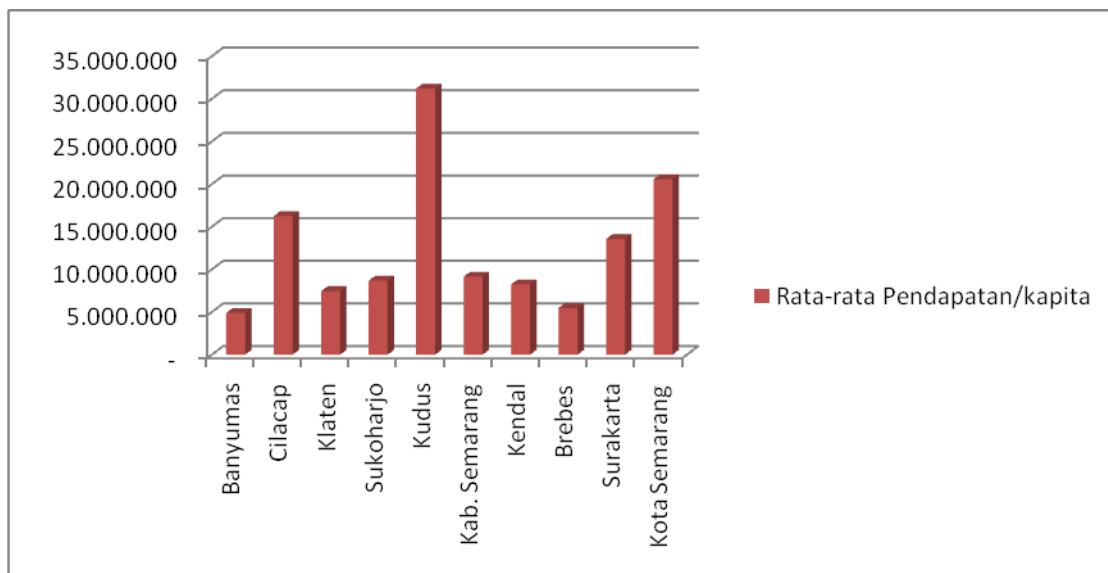
Perbandingan % Pertumbuhan PDRB per Kapita Kabupaten Kudus & Jawa Tengah
Tahun 2005-2009



Gambar 8 menjelaskan bahwa pendapatan per kapita per tahun Kab. Kudus tumbuh rata-rata = **7,82 %** dan Jateng sebesar **13,89 %**, meskipun demikian kalau kita lihat gambar dibawah ini menunjukkan bahwa Kab. Kudus menempati ranking terbaik dari 10 kabupaten dengan tingkat pendapatan per kapita terbesar di Jawa Tengah.

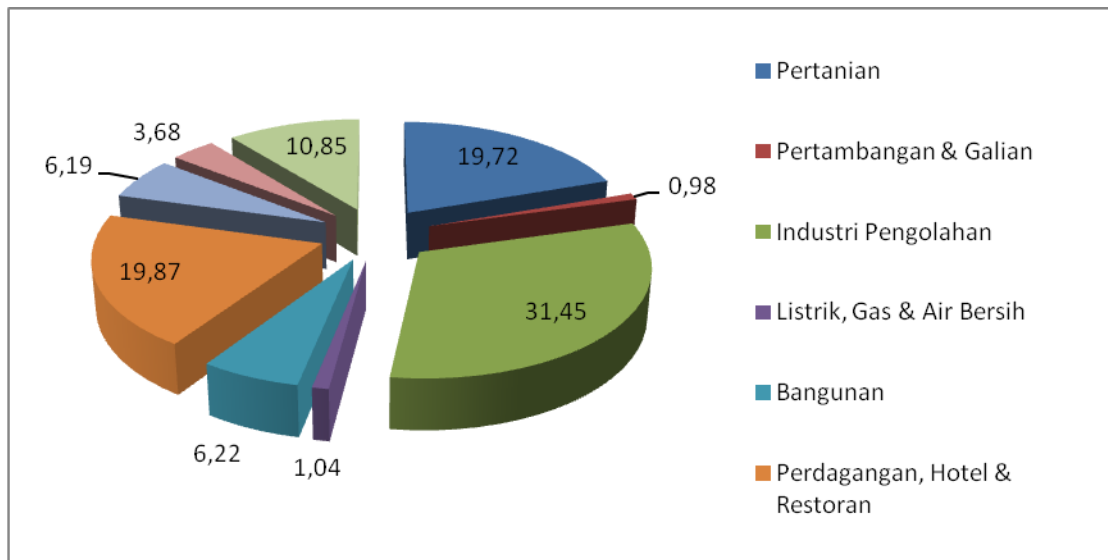
Gambar 9

Ranking 10 Kota/Kabupaten dengan Rata-rata Pendapatan /Kapita Terbesar Di Jawa Tengah 2005-2009 (dalam satuan Rupiah)

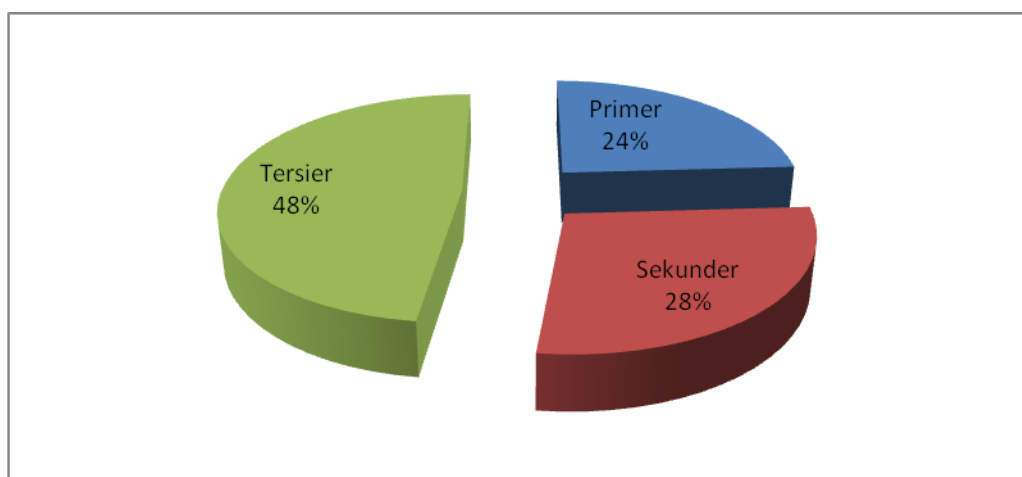


Gambar 10

Distribusi Persentase PDRB Menurut Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kudus tahun 2009.



Gambar 11
Distribusi rata-rata persentase PDRB Berdasarkan Kelompok Sektor
Di Kabupaten Kudus

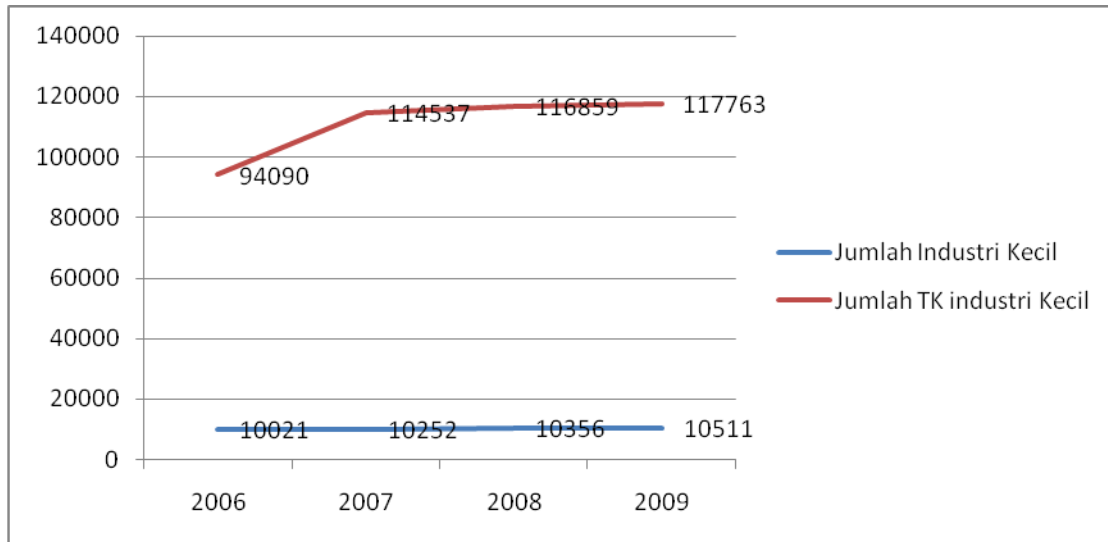


Gambar 10, menjelaskan bahwa struktur ekonomi kabupaten Kudus didominasi oleh kelompok sektor tersier yaitu sektor-sektor yang outputnya berupa jasa pelayanan, seperti perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, telekomunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor jasa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor ekonomi yang demikian merupakan daerah tujuan urbanisasi. Karena menjadi tujuan urbanisasi maka akan mendorong munculnya investasi-investasi yang mendukung berkembangnya wilayah ini termasuk investasi dibidang bisnis perbankan.

4. Potensi Usaha Kecil Mikro & Industri Rumah Tangga

Potensi sasaran industri perbankan khususnya BPR pada umumnya adalah industri mikro dan kecil baik pengusahanya itu sendiri maupun tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Gambar 12
 Jumlah Industri Kecil dan Tenaga Kerja Industri Kecil
 Di Kabupaten Kudus

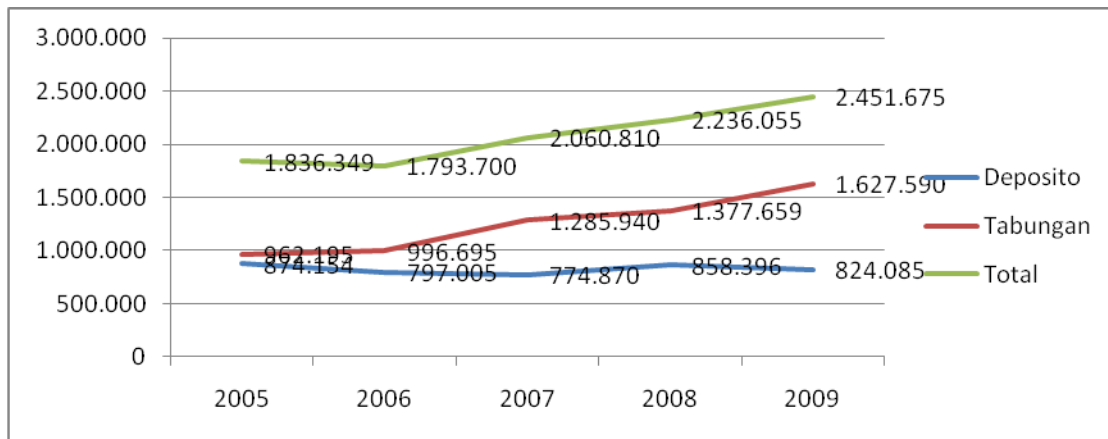


Gambar 12 menjelaskan bahwa industri kecil terus tumbuh rata-rata 1,61% per tahun dan jumlah tenaga kerja yang terlibat yang bekerja di industri kecil rata-rata tumbuh sebesar 8,18% per tahun, hal ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri BPR

5. Kinerja Keuangan Perbankan di Kabupaten Kudus

Pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk deposito dan tabungan oleh perbankan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Rata-rata tingkat pertumbuhannya sebesar 7,68% masih dibawah rata-rata tingkat pertumbuhan di Jawa Tengah yang sebesar 15,62%. Namun demikian ternyata perbankan di Kabupaten Kudus mampu menghimpun dana masyarakat yang cukup baik dibandingkan rata-rata perbankan di daerah lain di Jawa Tengah. (Gambar 14).

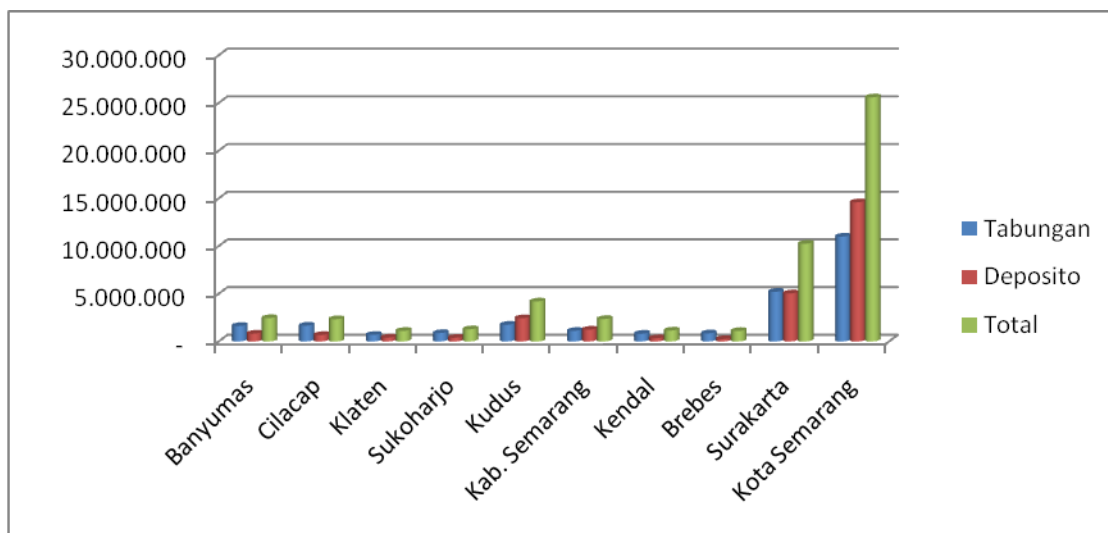
Gambar 13
 Pertumbuhan Deposito dan Tabungan Perbankan di Kabupaten Kudus



Kab. Kudus rata2 pertumbuhan DPK = **7,68 %**, Jateng = **15,62 %**

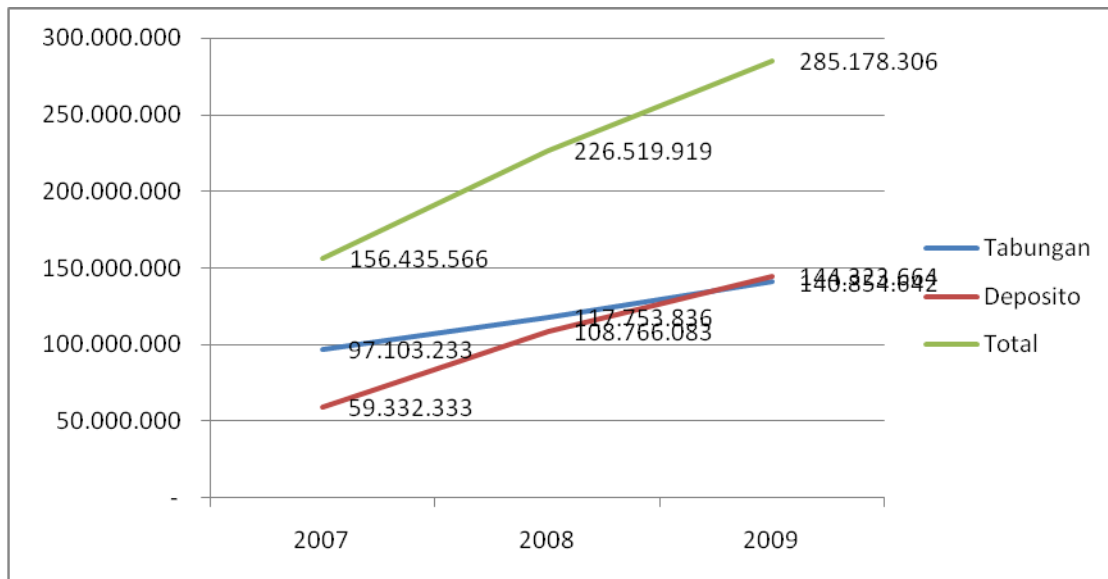
Gambar 14

Urutan Kemampuan Penghimpunan Dana Oleh Perbankan
di-10 Kab/Kota Terbesar di Jawa Tengah



Gambar 15

Pertumbuhan Deposito dan Tabungan BPR di Kabupaten Kudus



Gambar 15 menjelaskan bahwa tabungan rata-rata tumbuh 20,44% sedangkan deposito rata-rata tumbuh sebesar 58% sehingga secara total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun BPR di Kabupaten Kudus rata-rata per tahun tumbuh sebesar 35,35%. Rata-rata pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank secara keseluruhan di Kabupaten Kudus juga lebih tinggi dibandingkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan BPR dalam menarik dana masyarakat di Kabupaten Kudus sangat baik.

Tabel 1
**Proporsi DPK Bank Umum & BPR dari seluruh DPK Perbankan
 di Kabupaten Kudus Tahun 2007-2009 (dalam Jutaan Rp)**

Tahun	DPK	DPK BPR	DPK Bank Umum	Proporsi BPR	Proporsi Bank Umum
2007	2.241.752	156.435,57	2.085.316,43	6,98 %	93,02 %
2008	2.425.598	226.519,91	2.199.077,09	9,34 %	90,66 %
2009	2.718.256	285.178,31	2.433.076,69	10,49 %	89,51 %
Rata2				8,94 %	91,06 %

Tabel 1, tersebut menjelaskan bahwa DPK yang berhasil dihimpun BPR rata-rata sebesar 8,94% dengan proporsi yang semakin meningkat sedangkan bank umum mampu menghimpun rata-rata sebesar 91,06% dengan proporsi yang semakin turun.

Ada kecenderungan peluang BPR untuk menghimpun dana yang semakin besar artinya potensi pendirian BPR baru sangat menguntungkan.

Tabel 2

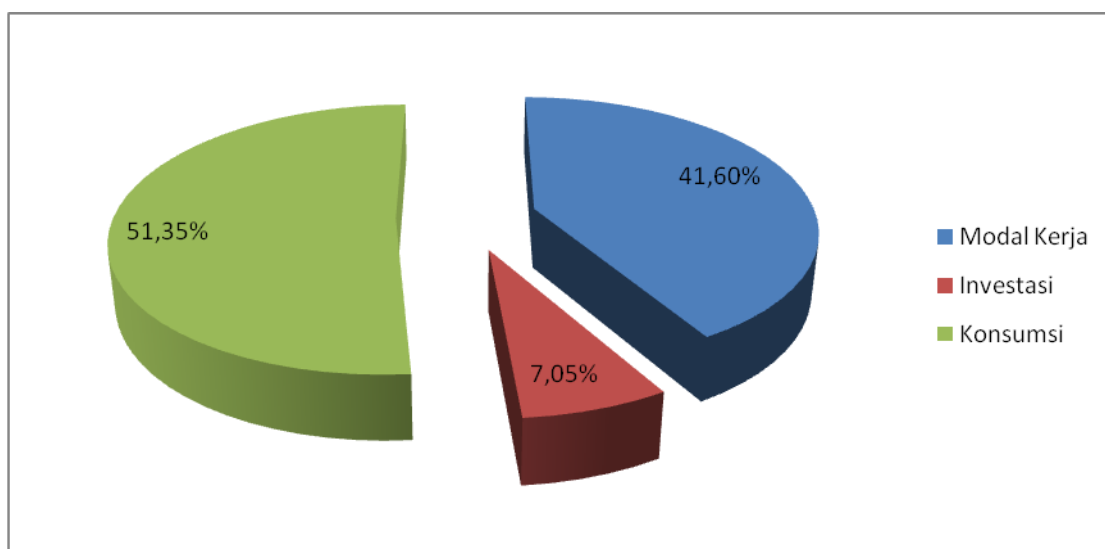
Potensi Dana Pihak Ketiga yang dapat diambil oleh perbankan di Kab. Kudus

Jumlah Dana Bersih yang Tersedia Di tahun 2009	Volume Usaha Koperasi Di tahun 2009	Potensi Dana Masyarakat Setelah dikurangi potensi Koperasi	Potensi dana yang dapat diambil oleh perbankan diasumsikan hanya 60%
2.643.881.917.650	263.903.000.000	2.379.978.917.650	1.427.987.350.590

Tabel 2 mengisyaratkan bahwa seandainya potensi dana yang dapat diambil oleh perbankan hanya 60% maka jumlah dana yang bisa dihimpun perbankan adalah Rp. 1.427.987.350.590. Kemampuan BPR mengambil dana masyarakat rata-rata sebesar 8,94% (lihat tabel 1) maka peluang BPR dalam meraih dana masyarakat di Kabupaten Kudus adalah sebesar Rp. 1.427.987.350.590 x 8,94% = Rp. 127.662.069.143, maka dapat diartikan bahwa potensi pendirian BPR baru masih sangat memungkinkan.

Gambar 16

Rata-rata Proporsi Penggunaan KUMKM Perbankan di Kabupaten Kudus

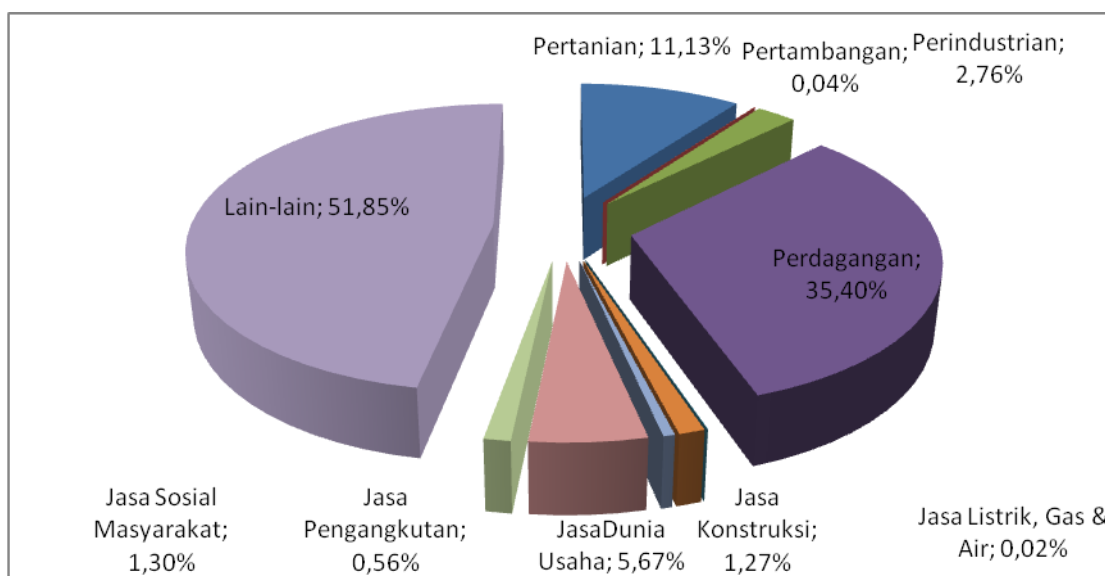


Gambar 16 menjelaskan bahwa penyaluran kredit perbankan di Kabupaten Kudus sebagian besar untuk kredit konsumsi 51,35%, modal kerja 41,60% dan investasi

7,05%. Proporsi yang demikian tidak mengkhawatirkan justru akan menarik minat bagi pendirian BPR yang baru karena dari sisi jangka waktu pemberian kredit untuk BPR adalah jangka pendek. Kredit konsumsi diberikan kepada karyawan dengan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang ada di Kabupaten Kudus.

Gambar 17

Proporsi Penggunaan KUMKM Perbankan Menurut Sektor Ekonomi di Kabupaten Kudus Tahun 2008-2009



Gambar 17 menjelaskan bahwa BPR baru yang akan datang perlu memperhatikan fenomena pemberian kredit perbankan selama ini sebagai dasar pijakan strategi bersaing dimana sektor-sektor potensial akan semakin menarik dimasa yang akan datang.

6. PROYEKSI VARIABEL UNTUK TAHUN 2011 KE ATAS

a. Jumlah Penduduk:

$$Y = 1.483.605 + 6.559,2X$$

b. Jumlah Penduduk Usia Produktif

$$Y = 996.100 - 1.821,3X$$

c. Jumlah Penduduk Bekerja

$$Y = 642.885 + 2.962,1X$$

d. Rata-rata Jam Kerja Seminggu

$$Y = 39,70 + 0,85X$$

e. PDRB

$$Y = 5.467.461 + 935.994X$$

f. PDRB per Kapita

$$Y = 3.698.812 + 601.141X$$

g. Dana Pihak Ketiga

$$Y = 1.985.365 + 238.252X$$

h. KUMKM Perbankan

$$Y = 2.008.780 + 633.191X$$

Hasil analisis trend memberikan gambaran bahwa semua variabel yang diperlukan untuk analisa pendirian BPR baru di Kabupaten Kudus sangat mendukung sehingga sudah selayaknya investasi pendirian BPR konvensional di wilayah sangat potensial.

C. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. SIMPULAN

- a. Peluang investasi di kab Kudus untuk BPR Konvensional sangat besar
- b. Analisis proyeksi tahun 2011 dan selanjutnya atas semua indikator-indikator ekonomi penting yang menjadi pertimbangan utama dalam kajian ini seperti : jumlah penduduk,, produktivitas TK, PDRB dan PDRB/Kapita, Dana Pihak Ketiga dan Kredit menunjukkan kecenderungan terus meningkat di tahun-tahun mendatang, hanya jumlah penduduk usia produktif yg cenderung menurun.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis potensi Kab. Kudus di atas, maka dapat direkomendasikan bahwa potensi pasar pada BPR Konvensional di kabupaten Kudus masih sangat besar.

-----OOOOO-----

- Anonimous, 2010. Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Anonimous, 2010. Kabupaten Kudus Dalam Angka Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.
- Anonimous, 2010. Berita Resmi Statistik. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Anonimous, 2010. Statistik Ekonomi-Keuangan daerah Jawa Tengah. BI Semarang.
- Al Kadri, 1999. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka.
- Basuki, 1997. Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun 1969-1994. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 12,2,50-65, Universitas Gajah Mada, 1997.
- Gunadi Brata, Aloysius. 2004. Analisis Hubungan Imbal balik antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tk. II di Indonesia. Lembaga Penelitian Universitas Atma jaya Yogyakarta.
- Kuncoro Mudrajad. 1997. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan. UPP AMP YKPN Yogyakarta.
- Ranis, Gustav. Et.al.2000.Economic Growth and Human Development. World Development Vol.28.No.2,pp.197-219,2000.
- Sukirno,Sadono. 2000 Makro Ekonomi Modern : Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian baru. Raja Grafindo Pustaka.
- Suryana, 2000. Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Penerbit Salemba Empat Edisi Pertama, 2000.